



Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

The Efforts Of The Village Government To Enhance Community Participation In The Development Of Oluhuta Village At Atinggola Subdistrict In North Gorontalo District

Riyanti Samaun^{1)*}, Bala Bakri²⁾, Achmad Risa Mediansyah³⁾

¹²³⁾Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email: ratisamaun01@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah, 2) pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) factor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta sikap gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, 2) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa berasal dari pemerintah sendiri yang kurang cakap dalam pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya pembiayaan pembangunan desa, dan sikap masyarakat yang bersikap masa bodoh yang memandang pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal yang tidak penting, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Kata kunci: upaya pemerintah; partisipasi masyarakat; pembangunan desa

Abstract

This study aims to find out the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North Gorontalo District. This study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction,

data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village government to encourage community participation in village development are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle production from the village government, and 3) fostering the decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development are namely the openness and the commitment of the village government in involving the community in the development and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in the development of the village come from the government itself, which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the community in viewing the village development is not important, so in the implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not participate in the development.

Keywords: government efforts; community participation; village development

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa harus semakin menantang di masa depan dengan keadaan perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Namun, desa sampai sekarang masih belum berpindah dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak menerima bahwa desa memiliki peranan yang besar untuk kota, namun tetap saja desa dianggap rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Meskipun kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mendiami daerah pedesaan bekerja sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segala rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004)

Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab keperluan seluruh masyarakat setempat. Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa.

Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam semua aspek, baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Desa amat dibutuhkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya, perubahan baru dan perhatian pemerintah Desa pada sarana dan prasarana desa.

Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang maksimal. Desa merupakan bagian terpenting dari struktur pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan program pemerintah pusat. Dalam hal ini desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat menyampaikan informasi tentang program pemerintah. Desa berperan untuk melayani serta menata pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa.

Melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahdesa memiliki tanggungjawab yang cukup berat, karena desa sebagai satuan organisasi yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada masa sekarang ini, peran pemerintah Desa amat menunjang semua bentuk pelaksanaan pembangunan. Berbagai aspek perubahan sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah Desa. Agar bisa menjalankan peranannya secara maksimal, pemerintah Desa perlu mengembangkan etos kerja sesuai dengan tujuan perencanaan kerja.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama atau kegiatan bersama yang membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang ada, agar proses pembangunan nasional dapat meraih tujuan pembangunan secara maksimal seperti yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarah penggunaan arah pembangunan yang terbatas dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, dan efisien (Affifuddin, 2010 : 47).

Dalam kaitannya dengan pembangunan Desa yang luas, tersusun rapat dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah Desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat Desa yang bersangkutan. Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran diperolehnya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan adanya efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan Desa itu sendiri sangat berarti.

Sekarang ini, dalam membuat dan meningkatkan kehidupan masyarakat Desa semakin penting dilaksanakan karena hampir semua penduduk bermukim dipedesaan. Keikutsertaan masyarakat dalam urusan pembangunan sangat dinantikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah mensyaratkan kondisi sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan tugas, karena merekalah yang nantinya akan lebih banyak memastikan bergeraknya suatu daerah dalam melaksanakan urusan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya. Upaya dalam memperlancar kemakmuran masyarakat daerah sebetulnya telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah melewati berbagai macam program pembangunan, seperti Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya.

Pembangunan Desa sebagai bagian yang perlu dari pembangunan nasional yang paling menjamah kehidupan masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa seharusnya dimulai dari memperbaiki aparat desa yakni orang yang merealisasikan rancangan serta mampu menciptakan kesenangan untuk orang desa melewati proses yang adil dan betul.

Untuk telaksananya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting buat pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan Desa. Selain itu, untuk dapat tercapainya pembangunan Desa diperlukan kemampuan Kepala Desa dalam bekerja sama dengan perangkat Desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa adalah untuk tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik.

Di dalam pembangunan ditemui permasalahan yang sangat berkaitan untuk dibahas. Pertama, sebuah wilayah mulai dari desa sampai pada level Negara, jika tidak ada partisipasi masyarakat, tentu Negara tersebut akan jauh ketinggalan, sebab Negara merupakan kumpulan dari orang-orang yang menyatakan diri hidup bersama dalam satu wadah organisasi yang disebut negara. Kedua, pada era pemerintahan Orde Baru telah memaklumkan bermacam-macam upaya kebijakan dan program pembangunan pedesaan, tapi secara riil bisa dilihat bahwa situasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan sangat jauh dari harapan. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan masyarakat pedesaan bukan cuma pada sektor pertanian, penyaluran bantuan akan tetapi pada urusan yang banyak bersentuhan penyelesaian bermacam-macam keperluan semua warga masyarakat agar mereka tidak bergantung pada orang lain, percaya dengan kemampuan diri sendiri, bebas dari mata rantai kemiskinan.

Pembangunan penting dilaksanakan dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat berubah menjadi baik agar bisa terwujud tujuan dari batasan pembangunan pedesaan yang amat luas. Pentingnya upaya pemerintah Desa meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa. Maka sudah tentu membantu pemerintah Desa tidak susah untuk mewujudkannya. Pemerintah diharapkan lebih berperan dalam memberikan dorongan pada masyarakat, agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembangunan rabat beton, pembangunan jamban keluarga, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan jumat bersih.

Berdasarkan pengamatan pembangunan di Desa Oluhuta, terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan sedikitnya upaya pemerintah desa memberi dorongan pada masyarakat dalam membangun Desa seperti, kurangnya kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat dan yang tidak menghiraukan bagaimana pentingnya pertumbuhan di dalam usaha pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa, masyarakat condong tidak berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan serta sering bersikap apatis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Lofland, yang dikutip dalam bukunya Lexy J Maleong, berpendapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:112). Hal serupa menurut Bogdan dan Taylor bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:3).

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di peroleh dari observasi dan wawancara langsung dengan subjek dan pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Serta data sekunder yaitu

data yang berbentuk dokumentasi atau arsip penting yang di peroleh melalui dinas tertentu seperti, buku, majalah, dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian.

Informan merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan dipilih untuk menggali informasi tentang pembangunan infrastruktur desa serta bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan sampel secara subjektif yang dianggap berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa dan masyarakat.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan sebagai berikut: Metode observasi merupakan teknik awal yang di gunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: keluarga, masyarakat. Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, metode ini merupakan alat mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Oluhuta. Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Iman Gunawan, 2013: 178).

Model analisis data di gunakan peneliti adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus.

Teknik yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Ahmad Tanzeh, 2009:57).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan upaya dan usaha pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya turut serta dalam pembangunan desa demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, BPD, LPM, dan perangkat desa lainnya saling berkoordinasi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pembinaan sikap kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak sapi,

dan pembinaan pengetahuan pada proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.

Wawancara mengenai pembinaan masyarakat desa dengan kepala desa Oluhuta.

“Saya selaku pimpinan di Desa Oluhuta ini selalu memberikan pembinaan peduli lingkungan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempat sampah. Selain itu juga, saya memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha ternak sapi dan keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada pembinaan pengetahuan masyarakat, saya memberikan pembinaan pada proses pengambilan keputusan bersama terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat menyampaikan semua aspirasinya. (Hamran Ahaya tanggal 20 Desember 2020)”

Untuk memperoleh informasi tentang upaya pembinaan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa, peneliti mewawancarai sekretaris desa yang menyatakan:

“Dalam proses pembangunan desa sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih bebas sampah. Saya mewakili semua perangkat desa, telah menjalankan program bank sampah untuk disalurkan ke rumah-rumah penduduk sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dengan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Program tersebut sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah desa yang dilaksanakan di aula desa. (Basrin Lakoro. Wawancara. Tanggal 20 Desember 2020).

Menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan sosialisasi untuk seluruh masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan, maka masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan masyarakat akan lebih menunjang keamanan dan kenyamanan desa. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 20 Desember 2020)

Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan pemerintah desa terkait pembinaan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, peneliti mewawancarai Pani Higa sebagai warga masyarakat di Desa Oluhuta yang menyatakan:

“Pemerintah desa selalu memberikan pembinaan kepada kami untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melestarikan lingkungan yang ramah lingkungan. Pemerintah desa juga membagikan tempat sampah di semua rumah warga sebagai tempat penampungan sampah yang diletakan di depan rumah warga. (Pani Higa. Wawancara. Tanggal 20 Desember 2020)”

Ditambahkan pula oleh Arzan Korompot yang menyatakan:

“Kepala Desa dan segenap perangkat desa memberikan pembinaan untuk peduli terhadap lingkungan baik kebersihan rumah dan kebersihan lingkungan di desa untuk tetap bersih dari segala sampah. (Arzan Korompot. Wawancara. Tanggal 20 Desember 2020)”

Terkait dengan upaya pembinaan pemerintah desa terhadap pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat, peneliti mewawancarai Fatma Ahaya yang menyatakan:

“Pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan semua kemampuan dan keterampilan mereka masing-masing melalui program pembangunan dari anggaran desa dan belanja modal pada pembangunan rabat beton dan jamban keluarga. (Fatma Ahaya. Wawancara, tanggal 21 desember 2020)”

Kemampuan dan keterampilan masyarakat dikembangkan dengan program pembangunan yang ada di desa dengan langsung mempekerjakan mereka sebagai tukang dengan bimbingan langsung dari pemerintah desa. (Ramang Moha. Wawancara, tanggal 23 Desember 2020).

Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengecek kebenaran tentang pembinaan pengembangan kemampuan masyarakat dalam membangun rabat beton di Desa Oluhuta dikemukakan oleh Hazrin Hulalata:

“Iya benar, saya salah satunya yang ikut bekerja dalam membuat rabat beton di Desa Oluhuta bersama rekan-rekan masyarakat lain. Pembangunan rabat beton juga sudah terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa. (Hazrin Hulalata. Wawancara, tanggal 23 Desember 2020)”

Pernyataan tersebut didukung oleh Haris Hula yang menyatakan:

“Saya dan rekan kerja lainnya membuat rabat beton dalam jangka waktu 2 minggu dengan jumlah pekerja 15 orang salah satunya saya dipercayakan sebagai tukang dalam membangun rabat beton di Desa Oluhuta. (Haris Hula. Wawancara, tanggal 23 Desember 2020)”

Berkaitan dengan informasi pembinaan pengambilan keputusan pada musyawarah desa, peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut: Susiyati Manti menyatakan:

“Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan semua aspirasi dan usulan mereka terkait dengan program pembangunan yang belum dilakukandi desa untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi anggaran desa pada tahun berikutnya melalui musyawarah desa. (Susiyati Manti. Wawancara, tanggal 23 desember 2020)”

Ditambahkan pula oleh ketua BPD yang menyatakan:

“Pengambilan keputusan setiap rencana kerja dan program desa selalu dibahas dalam musyawarah desa yang setiap tahunnya dilaksanakan 5 sampai 6 kali guna untuk mengumpulkan semua usulan dari masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai tambahan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan yang bersifat strategis yang telah dirumuskan oleh BPD. Bahan pembahasan disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kondisi obyektif desa dan aspirasi masyarakat. (Masrun Ahmad. Wawancara, tanggal 23 desember 2020)”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Salam Gobel yang menyatakan:

“Saya dan masyarakat lainnya sering menghadiri musyawarah desa melalui undangan ketua dusun. Dalam musyawarah tersebut membahas proses pengambilan keputusan tentang rencana kerja pembangunan di desa. Sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.(Salam Gobel.Wawancara, tanggal 23 desember 2020)”.

Hatim Monoarfa menyatakan:

“Saya ikut dalam musyawarah tersebut.Dalam musyawarah itu dihadiri sebagian kecil masyarakat, aparat desa dan tokoh agama membahas tentang bagaimana langkah pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan di desa.Kami diberikan kesempatan untuk memberikan semua usulan tentang perencanaan pembangunan.(Hatim Monoarfa.Wawancara, tanggal 23 desember 2020)”.

Rencana diselenggarakannya musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, keterwakilan kelompok perempuan, orang miskin, serta warga yang berpartisipasi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan musyawarah lebih transparan dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Oluhuta. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, pemerintah desa melakukan pembinaan sikap kepedulian lingkungan yang ramah lingkungan bebas dari sampah, pembinaan kemampuan masyarakat dalam membangun desa serta pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang dihadiri semua aparat desa, sebagian kecil masyarakat dan tokoh agama yang membahas tentang perencanaan pembangunan desa

2) Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di desa dengan membuat rabat beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat yang belum mempunyai jamban.Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk pengembangan kemampuan masyarakat serta meminimalisir angka pengangguran dikalangan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sudah cukup baik dalam hal pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan rabat beton, jamban keluarga, dan pembangunan non fisik seperti pelestarian lingkungan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam penentuan keputusan rencana pembangunan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa Oluhuta sebagai berikut.

“Masyarakat turut serta dalam membangun rabat beton dan jamban keluarga yang diikuti oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dengan berbagai macam keahlian dalam bidang bangunan, serta turut serta dalam memberikan masukan dan usulan dalam penentuan rencana pembangunan melalui musyawarah desa. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Salam Gobel menyatakan:

“Saya dan masyarakat lainnya ikut terlibat dalam membuat rabat beton dan jamban di desa Oluhuta. Kami membuat rabat beton dan jamban keluarga di semua dusun sesuai dengan program pembangunan yang telah menjadi rencana desa. (Salam Gobel. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Ditambahkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

“Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan bekerja sama membersihkan halaman mesjid, kantor desa, dan lingkungan desa melalui program jumat bersih bersama-sama dengan semua aparat desa. (Basrin Lakoro. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Herman Hula yang menyatakan:

“Setiap hari jumat di desa oluhuta melakukan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk membersihkan halaman mesjid, kantor desa dan lingkungan desa. (Herman Hula. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Pembangunan di Desa diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam mengukur seberapa berhasilnya suatu pembangunan yang ada di desa dilihat dari terciptanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembaga, tokoh-tokoh dan masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan secara gotong royong untuk membiasakan hidup bersih. Tujuannya agar masyarakat bisa sebagai pengontrol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.

Pada penentuan keputusan untuk pembangunan di desa, sebagian kecil masyarakat ikut terlibat dengan memberikan aspirasi dan usulan serta ide dan gagasan terkait pembangunan desa melalui musyawarah desa. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa baik itu infrastruktur fisik maupun non fisik. (Susiyanti Manti. Wawancara. Tanggal 25 Desember 2020). Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa yang menyatakan:

“Tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah proses pengambilan keputusan dengan memberikan usulan dan ide program pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut diputuskan terdapat beberapa pembangunan yang paling banyak diusulkan yakni pembangunan rabat beton dan jamban keluarga. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta di dalam kehidupan publik lokal. Kebanyakan intervensi atau campur tangan mereka yang bersifat khusus hanya menyangkut pemakaian pelayanan tertentu. Intervensi mereka diharapkan bisa terlaksana dalam jangka waktu yang singkat, hemat biaya bagi yang bersangkutan, dan dapat segera direspon oleh penyedia jasa yang terkait. Dengan kata lain, keterlibatan warga itu cenderung secara langsung menyentuh materi yang berkaitan dengan kepentingan setiap individu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelibatan masyarakat, dapat disimpulkan pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa melalui perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan rabat beton, dan pembangunan jamban keluarga. Namun tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

1) Faktor Pendukung

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Desa Oluhuta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, dan ketersediaan dana. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah masih kuatnya sikap sosial atau kegotongroyongan masyarakat, keswadayaan, kemandirian, dan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa yang menyatakan:

“Keterbukaan dan komitmen pemerintah desa Oluhuta untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kemudian membentuk mental masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan seperti kemandirian, kepercayaan diri, dan kesukarelaan berkorban dalam pembangunan. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu juga kecukupan dana atau keuangan desa yang menjadi pendukung dalam menggerakkan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan kelembagaan. Sumber biaya yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa didapat dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dan swadaya masyarakat Desa. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa yang menjadi faktor pendukung mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Hal tersebut masih terlihat sampai sekarang sesuai dari visi dan misinya. Pemerintah Desa Oluhuta dalam salah satu misinya ingin meningkatkan pengamalan kehidupan beragama, meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakatnya melalui penataan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi/bergotong royong. Basrin Lakoro. *Wawancara*, tanggal 26 desember 2020).

Ditambahkan pula Kasi Pemerintahan dan Pembinaan yang menyatakan:

“Tingkat pendidikan masyarakat juga sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin baik pola pikirnya untuk berfikir kritis terhadap arah pembangunan desa. (Fatma Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dari total jumlah penduduk yang ada yakni 621 penduduk, lebih dari setengahnya yakni 347 penduduk berpendidikan

SMA. Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka daya kritis masyarakat juga akan meningkat yang selanjutnya juga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena selain itu, tingkat pendidikan masyarakat pada akhirnya juga turut berperan dalam meningkatnya tingkat penghasilan masyarakat.

Faktor pendukung usaha pemerintah mendorong partisipasi masyarakat Desa Oluhuta dalam pembangunan desa yaitu sikap sosial atau kegotongroyongan masyarakat yang tinggi sehingga mudah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Namun, dalam perlibatannya tidak semua masyarakat yang ikut terlibat, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan desa. (Elmi Van Gobel. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Kepala Dusun menyatakan:

“Sikap gotong royong masyarakat sangat mendukung pembangunan di desa. Namun yang terlibat dalam pembangunan di desa tidak semua masyarakat yang hadir. (Agusalim Nakoda. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan yang menjadi pendukung dalam upaya pemerintah desa Oluhuta dalam mendorong partisipasi masyarakat membangun desa didukung komitmen pemerintah desa Oluhuta sendiri dalam melibatkan masyarakatnya untuk berperan dalam pembangunan desa, sikap gotongroyong yang dimiliki masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang selama ini dihadapi Pemerintah Desa Oluhuta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adayang berasal dari dalam Pemerintah Desa Oluhuta dan yang berasal dari masyarakat. Dari dalam Pemerintah Desa Oluhuta, yakni lambatnya pembukuan atas pelaporan penggunaan APBDesa, sehingga membuat Pemerintah Desa Oluhuta menjadi lambat dalam mengeksekusi program pembangunan, termasuk di dalamnya juga untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor hambatan dari dalam masyarakat Desa Oluhuta sendiri adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingganya sering berlaku apatis atau masah bodoh dalam urusan di desa sehingga dapat menghambat proses-proses selanjutnya. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering meremehkan atau tidak menganggap penting pembangunan desa juga membuat Pemerintah Desa Oluhuta kesulitan dalam hal melaksanakan program pembangunan di desa. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa yaitu:

“yang menghambat upaya kami sebagai pemerintah desa Oluhuta yakni keterlambatan pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga sebagian besar berlaku masah bodoh, tidak menghiraukan pembangunan di desa bahkan meremehkan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga membuat upaya pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Karena sekecil apapun kontribusi dari masyarakat, apalagi yang berbentuk dana dan dapat dinilai dengan rupiah harus dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember 2020)”.

Hambatan yang sering dijumpai dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berasal dari masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan di desa. Sebagian besar masyarakat berpandangan

pelaksanaan pembangunan di desa tidak penting bagi mereka sehingga membuat mereka tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. (Basrin Lakoro. *Wawancara*, tanggal 26 desember 2020).

Susiyati Manti selaku Kaur Keuangan dan Perencanaan menyatakan:

“Penghambat dalam upaya mendorong masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa yakni perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap perkembangan pembangunan di desa serta keterlambatan pembukuan keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan merupakan penghambat yang utama. Oleh karena itu, upaya dan usahapemerintah desa dalam melibatkan masyarakat menjadi terhambat. (Susiyati Manti. Wawancara. Tanggal 26 Desember 2020)”.

Kelancaran keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu jalan untuk membiayai proses perlibatan masyarakat ikut serta dalam pembangunan. Selain itu juga kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni factor keterlambatan pembukuan pelaporan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan desa serta ketidakedulian masyarakat terhadap urusan pembangunan di desa.

B. PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat yakni pembinaan sikap masyarakat yang peduli lingkungan. Selain itu juga, pemerintah desa memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha ternak sapi dan keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada pembinaan pengetahuan masyarakat, pemerintah desa memberikan pembinaan proses pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat menyampaikan semua aspirasinya.

Dalam pengambilan keputusan hanya terfokus pada beberapa orang saja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penentuan kebijakan. Pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Menurut model ini, pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi keuntungan elite-elite tersebut. Tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap cara dunia rill berjalan. Bahwa dalam dunia ril ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada “massa” yang tak memegang kekuasaan. (wayne Parsons, 2008:247).

Peneliti membandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori pembuatan keputusan bahwa, model keputusan tingkat desa di Desa Oluhuta tergolong model elitis, dimana kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Hal ini dilihat dari pemerintahan yang ada di desa Oluhuta masih menggunakan sistem lama, dimana berjalannya musyawarah desa, masih menunggu

perintah dari Kepala Desa. Peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Bahwa, BPD menjadi titik focus dari hal-hal yang bersangkutan dalam berjalannya musyawarah hingga terealisasinya hasil musyawarah yang ada di desa. Dalam undang-undang tertulis dengan jelas bahwa BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat, dan BPD yang merumuskan serta membuat bahan musyawarah yang didiskusikan dengan Kepala Desa serta BPD. Hal ini berbeda dengan yang ada di Desa Oluhuta, BPD bergerak atau melakukan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari Kepala Desa.

2) Perlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan di desa membuat rabat beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat yang belum mempunyai jamban. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengusulan rencana pembangunan di desa serta melibatkan masyarakat dalam melestarikan lingkungan desa dengan membersihkan lingkungan desa dari semua jenis sampah dan rumput melalui program Jumat bersih yang diadakan setiap seminggu sekali.

Perlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dalam mewujudkan tujuan bersama menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan di desa baik itu fisik, maupun pembangunan non fisik. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan desa serta mengurangi angka pengangguran yang ada di desa Oluhuta dengan memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa.

Pembangunan di desa Oluhuta bukan hanya melibatkan beberapa masyarakat saja akan tetapi seluruh masyarakat diharapkan untuk ikut terlibat dalam membangun desa. Namun, keterlibatan masyarakat hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat disebabkan kesibukan masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan yang menyebabkan mereka tidak turut serta dalam pembangunan desa.

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah Desa Oluhuta dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat sebagai yang menjalankan roda pembangunan di Desa Oluhuta yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Maka pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembaga, tokoh-tokoh dan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong royong untuk membangun infrastruktur yang ada di Desa Oluhuta, tujuannya agar masyarakat bisa sebagai pengontrol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.

faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa oluhuta kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung Pemerintah Desa Oluhuta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, sikap sosial, dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah masih kuatnya modal sosial kegotongroyongan masyarakat, keswadayaan dan kemandirian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Sjafrizal (2016) bahwa agar pembangunan daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Oleh karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik, memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat tepat karena pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa diberikan kewenang penuh untuk mengurus pemerintahan Desa.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa Oluhuta yakni kurangnya kecakapan aparat desa dalam pembukuan dan pencatatan pelaporan penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran keuangan desa berimbas pada proses pembangunan desa yang merupakan langkah untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu juga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Hal inilah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rahardjo Adisasmita (2006: 135) bahwa "yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa salah satunya yaitu sikap acuh tak acuh, apatis dan tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.

Faktor lain yang menghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yakni pendidikan yang masih rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi minim, Sarana dan Prasarana, faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Sarana dan prasarana yang harus cukup memadai baik dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya, syarat-syarat sarana dan prasarana semacam ini lah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, Keuangan, faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Salah satunya ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan dalam bidang

keuangan. Karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu a) melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan rencana pembangunan melalui musyawarah desa, dan b) melibatkan masyarakat dalam pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter, pembangunan jamban keluarga, dan melaksanakan program jumat bersih seminggu sekali; 2). Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu (a) faktor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap kegotongroyongan masyarakat yang cukup baik, dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. (b) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa yakni kurangnya kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, dan sikap apatis masyarakat yang tidak menghiraukan pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Arikunto Suharsimi, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edward Samuel Finer. 2006. *Pemerintahan Komparatif*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Finer, Samuel Edward. 2006. *Comparative Government*. Terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung.
- Gunawan Iman, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hernowo, Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty. Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur Syarif, 2008, *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektifitas Organisasi: Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maleong J. Lexy. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosadakarya.
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta. Nasution, 1991. *Metode Research*, Bandung: JEMMARS.
- Ndraha, Talizidhuhu. 1987. *Metodologi Pembangunan*. Indonesia. Jakarta. PT Bina Aksara.

- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prastowo Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Raharjo Adisasmita,. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Siagian Sondang P. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Penerbit CV. Gunung Agung. Jakarta.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sumodiningrat. 2007. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia*. Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Surachmad Winarno, 2006. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Tehnik*. Bandung: Tarsito.
- Sairin Sjafri, 2002. *Pembinaan Masyarakat Desa: Beberapa Alternatif Pendekatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sapari Imam Asy'ari,. 1993. *Sosiologi Perkotaan dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surianingrat Bayu, 2008. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafiie Kencana Inu. 2008. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Tanzeh Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wayne Parsons, 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*. (Jakarta: Fajar Interpratama Offset).